



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. SEGAR III KAV. 2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR  
Telp. (021) 87906240, Fax. 87906242 - Cibinong 16914  
Email : bappedalitbang@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 000.8.2.7/3134-sekret

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,

Tentang Pembentukan...

- Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PERATURAN PEMERINTAH...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah



10000 MBAM SETIA AJI, ST., M.B.A  
NIP. 197305012005011009

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;  
c. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;  
e. Pelaksanaan administrasi Badan;  
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan  
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

| No | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS                                                      |                                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                            | TARGET IKU | FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                                                | PENANGGUNG JAWAB      | SUMBER DATA    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|    | TUJUAN                                                                         | SASARAN                                              |                                                    |            |                                                                                                                                                    |                       |                |
| 1  | Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas | Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 89 %       | Nilai IPPD = Nilai Rata-rata, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA | Kepala Bappedalitbang | Bappedalitbang |

| No | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS |                                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                | TARGET IKU | FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                        | PENANGGUNG JAWAB      | SUMBER DATA    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|    | TUJUAN                    | SASARAN                                              |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                            |                       |                |
|    | Daerah yang berkualitas   |                                                      |                                                                        |            | Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin)<br>a. Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/kegiatan/Proyek (49 Poin (84.48%))<br>b. Inovasi Perencanaan Pembangunan (9 Poin (15.52)) |                       |                |
| 2  |                           | Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan | Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah | 64,86 %    | Jumlah Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi daerah pada tahun berkenaan dibagi jumlah Hasil riset dan Inovasi daerah yang dihasilkan lingkup Perangkat Daerah     | Kepala Bappedalitbang | Bappedalitbang |

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
 Penelitian dan Pengembangan Daerah  
 Kabupaten Bogor



BOGOR

BAMBAM SETIA AJI, ST., M.B.A  
 NIP. 19730501200501100

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 000.8.2.7/3134-sekret

TANGGAL : 31 Desember 2025

TABEL PENJENJANGAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

| NO                                                          | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN   | TAHUN 2026        | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KET. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                                                           | <b>TUJUAN Bappedalitbang</b>                                                          |                                                                                            |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                             | Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas               | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)                                               | Predikat | Baik              | Nilai IPPD =<br>Komponen Sinergi (32 Poin)<br>Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin)<br>Komponen Keterhubungan Perencanaan Kinerja (10 Poin)<br>Rentang Nilai:<br>91-100= Sangat Baik<br>81-90= Baik<br>71-80= Cukup Baik<br>61-70= Kurang<br><60= Sangat Kurang<br><br>"Nilai IPPD dan Inovasi Daerah = A + B<br>1= Tidak Baik<br>2 = Kurang Baik<br>3 = Cukup<br>4 = Baik<br>5 = Sangat Baik<br>A : Ketercapaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan B : Inovasi Daerah" |      |
|                                                             |                                                                                       | Indeks Riset dan Inovasi Daerah                                                            | Predikat | Sangat Baik       | Nilai Indeks Riset dan Inovasi Daerah =<br>Nilai Indeks Kualitas Kebijakan(50%) ditambah Nilai Indeks Inovasi Daerah(50%) / IRID =<br>(0,50 x IKK) + (0,50 x IID)<br><br>Sangat Baik = 76-100<br>Baik = 61-75<br>Cukup = 45-60<br>Kurang = <45                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                             | <b>SASARAN Bappedalitbang</b>                                                         |                                                                                            |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1                                                           | Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | %        | 73.48+15.52=89    | Nilai IPPD = Nilai Rata-rata,<br>Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA<br><br>Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin)<br>a. Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/kegiatan/Proyek (49 Poin (84.48%))<br>b. Inovasi Perencanaan Pembangunan (9 Poin (15.52))                                                                                                                                                                                          |      |
| 2                                                           | Hasil Riset dan Inovasi yang implementatif                                            | Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah                     | %        | 24/37*100 = 64.86 | Jumlah Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi daerah pada tahun berkenaan dibagi jumlah Hasil riset dan Inovasi daerah yang dihasilkan lingkup Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                       |                                                                                            |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                   | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                                | Predikat | BB                | Nilai dari 4 komponen SAKIP:<br>1. Perencanaan Kinerja<br>2. pengukuran kinerja<br>3. pelaporan kinerja<br>4. evaluasi akuntabilitas kienja internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                            |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                             | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Nilai AKIP Bappedalitbang                                                                  | Predikat | BB                | Jumlah Nilai dari komponen SAKIP:<br>Perencanaan (30 Poin)<br>Pengukuran (30 Poin)<br>Pelaporan (15 Poin)<br>Evaluasi Internal (25 Poin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                             | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Dokumen  | 8                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                             | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen  | 1                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

| NO                                     | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN      | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                           | KET. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                        | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dokumen     | 1          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |      |
|                                        | Tersedianya Dokumen DPA- -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen     | 1          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |      |
|                                        | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen     | 1          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |      |
|                                        | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     | 5          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |      |
|                                        | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 5          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |      |
|                                        | Tersedianya Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                            | Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral                                                                                                                   | Laporan     | 1          | Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral                                                                                                                   |      |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                                                        |      |
|                                        | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD                                                                                                                               | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan                                                                                                         | %           | 12/12*100  | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah dokumen keuangan yang disusun dikali 100%                             |      |
|                                        | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/Bulan | 14         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |      |
|                                        | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | Dokumen     | 12         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |      |
|                                        | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | Dokumen     | 1          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               |      |
|                                        | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Laporan     | 1          | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |      |

| NO | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                                       | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |      |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |            |                                                                                                                                                    |      |
|    | Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas                                                                        | Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah                                                              | %       | 2/2*100    | Jumlah Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah                                                                  |      |
|    | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | Dokumen | 2          | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  |      |
|    | Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | Dokumen | 4          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |      |
|    | Tersedianya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | Dokumen | 2          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         |      |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                             | Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas                                                                             | %       | 8/8*100    | jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah dikali 100%      |      |
|    | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                    | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | Unit    | 1160       | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      |      |
|    | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | Paket   | 3          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |      |
|    | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | Dokumen | 12         | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   |      |
|    | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | Dokumen | 12         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       |      |
|    | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | Dokumen | 4          | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 |      |
|    | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | Orang   | 9          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |      |
|    | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | Orang   | 135        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               |      |
|    | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan                                                                                | Orang   | 26         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             |      |

| NO | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                             | SATUAN  | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                  | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Perundang-Undangan                                                                   | Perundang-Undang                                                                      |         |            |                                                                                                                                                                               |      |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                                                                                       |         |            |                                                                                                                                                                               |      |
|    | Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas                      | Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan                | %       | 8/8*100    | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah dikali 100%                                               |      |
|    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | Paket   | 4          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                            |      |
|    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | Paket   | 2          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                |      |
|    | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | Paket   | 2          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                           |      |
|    | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | Paket   | 4          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                            |      |
|    | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | Paket   | 4          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                     |      |
|    | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Laporan | 12         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                       |      |
|    | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | 12         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           |      |
|    | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 4          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                          |      |
|    | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                         |      |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                                                                                       |         |            |                                                                                                                                                                               |      |
|    | Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                       | Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah                      | %       | 6/6*100    | jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dikali 100% |      |
|    | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | Unit    | 1          | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                           |      |
|    | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Unit    | 7          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                         |      |
|    | Tersedianya Mebel                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | Unit    | 1          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                            |      |
|    | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | Unit    | 1          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                       |      |
|    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | Unit    | 10         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                          |      |

| NO | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                         | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | Unit    | 5          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                       |      |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                                           |         |            |                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                      | persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan                      | %       | 4/4*100    | jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%                                        |      |
|    | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | Laporan | 12         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                        |      |
|    | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | Laporan | 12         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                               |      |
|    | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | Laporan | 1          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |      |
|    | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | Laporan | 12         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                 |      |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                           |         |            |                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | Berfungsinya barang milik daerah dengan baik                                                                        | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik                                               | %       | 5/5*100    | jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100% |      |
|    | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | Unit    | 20         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                               |      |
|    | Tersedianya pemeliharaan mebel                                                                                      | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                              | Unit    | -          |                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | Unit    | 121        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                   |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                 | Unit    | 1          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                             |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi           | Unit    | 70         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                       |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | Unit    | 2          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                             |      |
|    | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   |                                                                                                           |         |            |                                                                                                                                                                                                      |      |

| NO                                                                                    | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN       | TAHUN 2026    | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                                                                 | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                       | Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | Nilai rata-rata dari Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD                    | %            | 75/75*100     | Cara Pengukuran : Nilai rata-rata A+B<br>A. Keselarasan Program pada RKPD dibagi Program pada RPJMD dikali 100%<br>B. Keselarasan Program pada RENSTRA PD dibagi Program pada RPJMD dikali 100%                                              |      |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                       | Terpenuhiya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Ketentuan yang berlaku                  | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                       | %            | 2/2*100       | Nilai Rata-rata Persentase realisasi Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                                      |      |
|                                                                                       | Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                                   | Dokumen      | 2             | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                                                                                                                                            |      |
|                                                                                       | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain                                            | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                                                       | Dokumen      | 1             | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                       | Terlaksananya Konsultasi Publik                                                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               | Berita Acara | 1             | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                       | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | Berita Acara | 1             | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                       | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       | Berita Acara | 1             | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                       | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan                                                          | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     | Usulan       | 40            | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                       | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)                                    | Dokumen      | 2             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                                                                              |      |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                       | Terpenuhiya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah                                                         | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan      | %            | 75.33/93* 100 | Jumlah analisis data dan informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan di bagi jumlah seluruh analisis data dan informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di kali 100% |      |
|                                                                                       | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen      | 2             | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                                                                                                          |      |

| NO | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  | TAHUN 2026    | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                     | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan       | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                          | Orang   | 511           | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                                                    |      |
|    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah                                           | Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah                                                    | %       | 75.33/93* 100 | Jumlah ketercapaian IKU perangkat daerah dan IKU Pemerintah Daerah yang dihasilkan di bagi jumlah seluruh ketercapaian IKU dikali 100%                                                           |      |
|    | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                              | Laporan | 2             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                        |      |
|    | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                               | Laporan | 2             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                         |      |
|    | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                     |                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah                                              | Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD                                                                      | %       | 75/75*100     | Jumlah data Implementasi sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dihasilkan dibagi jumlah seluruh data implementasi sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah di kali 100% |      |
|    | Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah             | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                      | Dokumen | 3             | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                                                                                |      |
|    | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                 |                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                        | %       | 46,98*100 /58 | Keselarasn Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPd dikali 100%                                                                                                                 |      |
|    | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam                          | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam                           | %       | 46,98*100 /58 | Keselarasn Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPd dikali 100%                                                                                                                 |      |
|    | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                               | %       | 46,98*100 /58 | Keselarasn Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPd dikali 100%                                                                                                                 |      |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                 |                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | %       | 48,14*100 /58 | Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                          |      |

| NO | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  | TAHUN 2026    | RUMUS HITUNG                                                                                                                                    | KET. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | Dokumen | 2             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |      |
|    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | Laporan | 2             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |      |
|    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | Laporan | 5             | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          |      |
|    | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      |      |
|    | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen | 2             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |      |
|    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |      |
|    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 5             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |      |
|    | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               |      |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                        |                                                                                                                                                 |         |               |                                                                                                                                                 |      |
|    | Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)        | Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                       | %       | 48,14*100 /58 | Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                      |      |

| NO                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  | TAHUN<br>2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                             | KET. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                             | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen | 2             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |      |
|                                                             | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Laporan | 2             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |      |
|                                                             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 5             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |      |
|                                                             | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               |      |
|                                                             | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          | Dokumen | 2             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          |      |
|                                                             | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |      |
|                                                             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Laporan | 5             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |      |
|                                                             | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        | Laporan | 3             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        |      |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                          |      |
|                                                             | Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                          | %       | 48,14*100 /58 | Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                         |      |

| NO | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN       | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                              | KET. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen      | 2          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |      |
|    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Laporan      | 2          | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |      |
|    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan      | 5          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |      |
|    | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | Laporan      | 3          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               |      |
|    | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Dokumen      | 2          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |      |
|    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Laporan      | 3          | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |      |
|    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Laporan      | 5          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   |      |
|    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | Laporan      | 3          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 |      |
|    | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                       |                                                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                           |      |
|    | Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi Kebijakan                                                        | Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan                                                                          | Rekomen dasi | 7          | Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis riset dan inovasi yang dihasilkan dibagi seluruh rekomendasi dikali 100%                            |      |
|    | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                    |                                                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                           |      |

| NO | KINERJA                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN    | TAHUN 2026      | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                                                           | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                          | Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                             | %         | 7/7*100         | Jumlah bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dibagi Jumlah Riset yang ditargetkan dikali 100%                                                                                                |      |
|    | Terpenuhinya hasil evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar                                                                                                                | Persentase Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublisch                                                                                                                                                                | %         | 7/7*100         | Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan dibagi jumlah karya tulis ilmiah yang ditargetkan dikali 100%                                                                                                                                |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar                                                                                                                                                                          | %         | 7/7*100         | Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan dibagi jumlah karya tulis ilmiah yang ditargetkan dikali 100%                                                                                                                                |      |
|    | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                              | Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                                     | Laporan   | -               | Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                              |      |
|    | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                               | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                                           | Naskah    | 7               | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                                           |      |
|    | Terlaksananya fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                  | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                 | Laporan   | -               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                                                 |      |
|    | Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                                 | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                    | Laporan   | -               | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan                                                                                    |      |
|    | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan | Pelatihan | -               | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan |      |
|    | Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                    | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                    | Dokumen   | -               | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                  |      |
|    | Invensi dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    | Meningkatnya Invensi dan Inovasi Perangkat Daerah yang bermanfaat                                                                                                                                                                     | Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                              | Predikat  | Sangat Inovatif | Skor Inovasi Daerah = Skor Satuan Pemerintah daerah + Skor satuan Inovasi Daerah                                                                                                                                                       |      |
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                                                             | Laporan   | 1               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                                                             |      |

| NO | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  | TAHUN 2026 | RUMUS HITUNG                                                                                                                                                                                                                                              | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                                                                               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                                           | Laporan | 1          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                                           |      |
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual                                                                                                                                              | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)                                                                                        | Laporan | 1          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)                                                                                        |      |
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                  | Laporan | 1          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                  |      |
|    | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Laporan | 1          | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah |      |
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.                                                                                               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.                                                                                                | Laporan | 1          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.                                                                                                |      |
|    | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                                                                                                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                                                                                                                  | Laporan | 1          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                                                                                                                  |      |